

INFERENSI

Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan

Pandangan Masyarakat Pesisir Pantai Bajoe terhadap Faham
Free Will dan *Predestination*
Muhammad Hasbi

Strategi Penguatan Simbol Keberagamaan Masyarakat Muslim Minoritas
di Salatiga
M. Gufron dkk

Transformasi Peran Gender dalam Keluarga Santri di Mlangi,
Sleman, Yogyakarta
Sukron Ma'mun

Makna Berkah dalam Pergeseran Keberagamaan Tukang Ojek
di Kawasan Wisata Ziarah Kudus
Saifuddin

DAFTAR ISI



Daftar Isi

Pandangan Masyarakat Pesisir Pantai Bajoe terhadap Faham <i>Free Will</i> dan <i>Predestination</i> <i>Muhammad Hasbi</i>	1
Strategi Penguatan Simbol Keberagamaan Masyarakat Muslim Minoritas di Salatiga <i>M. Gufron dkk</i>	17
Transformasi Peran Gender dalam Keluarga Santri di Mlangi, Sleman, Yogyakarta <i>Sukron Ma'mun</i>	41
Makna Berkah dalam Pergeseran Keberagamaan Tukang Ojek di Kawasan Wisata Ziarah Kudus <i>Saifuddin</i>	63
Afiliasi Politik Kaum Santri Pondok Nazzalal Furqan dan Rodhotul al-Qur'an Salatiga di Era Multi Partai <i>Abdul Syukur</i>	87
Pluralisme dalam Pendidikan Agama di SMA Muhammadiyah Kupang, NTT <i>Aji Sofanudin</i>	109
Keberpihakan Pesantren An-Nawawi Berjari Purworejo Terhadap Partai Politik <i>Khoiruddin Mochtar</i>	127

KEBERPIHAKAN PESANTREN AN-NAWAWI BERJAN PURWOREJO TERHADAP PARTAI POLITIK

Khoiruddin Mochtar
Dosen STAINU Tasikmalaya
khoiruddin09@yahoo.com

Abstract

Pesantren An-Nawawi has been supporting its political concern on Golkar since 1982. When the Orde baru tend to be vanishing many of Islam organization declare the new political party, by which the affiliation of Islamic boarding school in advance. But on the other hand the Pesantren An-Nawawi (Islamic boarding school) is still support the Golkar. This phenomena, will be very interesting while the Golkar itself was left by its supporter due to people opinion that this organization is part of the Orde baru which is targeted to end. This phenomena then be analysed through behavior, ideology, and rating theory.

The question may arise on this research in term of reason why it continue to affiliate to Golkar, the models of affiliation it pretend, and the motive around the affiliation due to its existence. Observation and depth interview was applied to find out these phenomena. The finding shows that the affiliation provide significant consequences in term of moral assistance in which the improvement of facilities and networking to the other organization and department management.

Keywords: affiliation, political party, organization networking

Latar Belakang Masalah

Pesantren sebagai sebuah kekuatan sosial tidak pernah habis-habisnya untuk dibicarakan, pembahasan ini semakin lama semakin menggugah peneliti untuk terus melakukan pengamatan, pesantren merupakan institusi yang unik dan menarik, sehingga ada saja aspek-aspek yang menjadi objek penelitian. Pesantren sejak masa penjajahan merupakan lembaga pendidikan yang tumbuh, berkembang dan mendapatkan pengakuan tersendiri dari masyarakat. Pesantren juga ikut terlibat dalam upaya pencerdasan kehidupan bangsa, tidak hanya dari segi moralitas, namun juga ikut serta memberikan sumbangsih yang cukup signifikan dalam penyelenggaraan pendidikan.

Pesantren adalah lembaga pendidikan keagamaan yang mempunyai kekhasan tersendiri dan berbeda dengan lembaga pendidikan lainnya. Pendidikan di pesantren meliputi pendidikan Islam, dakwah, pengembangan kemasyarakatan dan pendidikan lain yang sejenis. Peserta didik di pesantren disebut santri yang umumnya menetap di pesantren (Gertz; 1983: 242). Zamahsyari Dhofir melihat tradisi pesantren sebagai bentuk system sosial yang tumbuh di lingkungan pesantren melalui sistem kekerabatan yang dibangun kiai, jaringan aliansi perkawinan, genealogi intelektual dan aspek hubungan antara guru dan murid atau kiai dengan santri (Dhofir dalam Ummatin; 2001: 259-260)

Pesantren dalam perkembangan selanjutnya tidak hanya bermain dalam domain pendidikan. Berkaitan dengan kondisi dan kebutuhan, maka pesantren sebagai bagian dari unsur negara berhadapan juga dengan situasi politik yang mendorong untuk mengambil sikap dalam berpolitik, sehingga masing-masing pesantren mengambil alternatif untuk berpartisipasi dalam politik dengan pasif dan ada pula pesantren yang mengambil peran aktif dengan berafiliasi terhadap partai politik tertentu. Hal ini dimaklumi karena setiap kelompok orang berhadapan dengan perubahan dan nilai-nilai baru yang mengharuskan menyesuaikan diri secara terus menerus (Abdullah; 2009: 43) ijarah dari Makkah ke Madinah. Pemilihan Madinah sebagai kota hijrahnya, menunjukkan tentang rencana Nabi dalam rangka mengemban misi sucinya dari Tuhan yaitu menciptakan masyarakat berbudaya tinggi yang kemudian menghasilkan entitas sosial politik sebuah negara. Negara Madinah yang dipimpin oleh Nabi adalah model hubungan antara agama dan negara dalam Islam (Rahman, 1995: 589). Hampir semua perdebatan tentang relasi agama dan negara merujuk kepada model negara Madinah yang dikembangkan oleh nabi Muhammad Saw. Formulasi relasi agama dan negara ini telah menimbulkan multi interpretatif ketika dikembangkan untuk mencari formulasinya dalam kontek kehidupan zaman modern ini. Inilah yang kemudian menimbulkan perdebatan yang tidak pernah usai dan mencapai titik temu hingga sekarang ini. Masing-masing pihak memiliki kerangka interpretasi yang berbeda dalam memahami model negara Madinah untuk kehidupan kontemporer (Patoni; 2007: 5).

Berhubungan dengan hal di atas pesantren yang merupakan basis NU, dipengaruhi dan memegang landasan dengan konsep politik sunni. Paradigma dengan pendekatan fiqh dalam masalah-masalah kenegaraan ini, menjadikan NU dan pesantren cenderung berwatak

akomodatif dan fleksibel. Persentuhan Kiai, pesantren dan politik, didasarkan atas keyakinan bahwa, dalam ajaran Islam, antara agama dan kekuasaan disatukan secara tuntas (Smith dalam Patoni, 2007). Nabi Muhammad sendiri disamping sebagai pemuka agama juga pemimpin politik. Demikian pula Abu Bakar, Umar, Usman, dan Ali, disamping mereka sebagai ulama yang memahami agama, mereka juga sebahai Khalifah atau pemimpin umat. Fenomena pesantren yang terlibat dalam partai politik akhir-akhir ini merupakan gejala yang dianggap lumrah dan dimaklumi oleh masyarakat.

Pesantren sampai saat ini dipercaya sebagai sebuah lembaga yang mempunyai kekuatan untuk memobilisasi masa dengan kekuatan pengaruh kharisma kiainya. Kekuatan pengaruh inilah yang kemudian menjadi daya pikat tersendiri bagi setiap partai politik, baik partai politik yang berlandaskan dan berbasis Islam maupun partai politik yang tidak berbasis Islam untuk mendapatkan simpati ataupun dukungan dari pesantren. Kerap kali pesantren menjadi ajang perebutan partai politik untuk menancapkan kaki-kakinya, sehingga mendapatkan suara signifikan dalam setiap pemilihan umum. Fenomena ini memberikan bukti, ternyata partai politik yang berhasil menggandeng pesantren tertentu, mampu mendapatkan suara yang berarti. Hal ini juga memberikan ruang pilihan kepada kiai dan pesantrennya untuk memilih berafiliasi atau tidak terhadap partai politik. Dengan berbagai alasan, konsep, prinsip masing-masing, maka terlihatlah beberapa pesantren yang menentukan sikap untuk berafiliasi dengan partai tertentu.

Dorongan afiliasi ini erat hubungannya dengan kebutuhan akan ketergantungan pada orang atau kelompok lain (Ensiklopedia Indonesia; 1991: 961). Woskinsky menyebutkan bahwa, faktor yang mempengaruhi afiliasi politik seseorang atau warga Negara dalam menentukan sikap politiknya biasanya karena faktor subjektif, faktor agama, etnis, rasial, faktor wilayah dan kelas (Toekan: 2000). Afiliasi politik pesantren disamping sebagai suatu pilihan pemahaman atas suatu ideologi yang didasarkan atas alasan suatu agama, juga terdapat dorongan-dorongan rasional untuk mendapatkan beberapa hal yang menjadi kebutuhan pesantren baik kebutuhan fisik pesantren ataupun kebutuhan jaringan.

Pondok Pesantren An-Nawawi Berjan Purworejo adalah sebuah pesantren yang menyatakan dirinya berafiliasi dengan partai politik Golongan Karya (Golkar), meskipun tidak melibatkan diri dalam kepengurusan Golkar, namun secara moral, pesantren ini memiliki hubungan dekat dan memberikan dukungan politik secara transparan untuk mendukung perolehan suara Golkar dalam setiap pemilihan

umum. Fenomena ini menjadi menarik untuk dikaji, karena ketika pesantren-pesantren yang berafiliasi kepada Golkar mulai meninggalkan partai ini, ternyata Pesantren An Nawawi ini tetap setia untuk berafiliasi dan mendukung kemenangan Golkar. Hal inilah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Permasalahan

Dengan mengamati fenomena tersebut maka, rumusan masalahnya adalah: (1). Mengapa lembaga pesantren melakukan afiliasi politik terhadap partai Golkar? dan (2). Bagaimana implikasinya terhadap eksistensi pesantren yang kemudian diaplikasikan dalam bentuk analisa afiliasi dan melihat implikasinya terhadap eksistensi sebuah pesantren.

Tinjauan Pustaka

Penelitian tentang tradisi pesantren dan politik telah banyak dilakukan oleh para peneliti, diantaranya adalah Clifford Geertz, yang telah melakukan studi sosiologi dan antropologi tentang masyarakat dan kebudayaan Jawa. Hasil penelitian ini dibukukan dengan berjudul "Religion of Java", dari penelitiannya ditemukan bahwa, masyarakat Jawa berada dalam tiga setting kekuatan yaitu; Abangan, santri, priyayi, dan masing-masing kekuatan itu terdapat ketegangan-ketegangan (Geertz; 1989: 477)

Sementara itu, penelitian Ziemek Manfred 1986, Abdul Gaffar Karim 1995, dan Achmad Patoni 2007, memandang kiai pesantren sebagai pusat perhatian masyarakat, peran kiai pesantren diakui memiliki magnet pengaruh dan dukungan yang besar dalam komunitasnya baik dalam bidang sosial maupun politik. Besarnya perhatian terhadap kiai pesantren ini, tidak hanya dalam bentuk dukungan moral tetapi juga dalam bentuk partisipasi politik praktis.

Sedangkan Fathoni dan Zen (1992), Ida (1996), dan Ikhsan (1996) melihat hubungan NU dan Kiai pesantren sebagai ulama, merupakan hubungan sebangun yang memiliki arti formal legitimate, dimana perjalanan politik NU beriringan dengan peran politik kiai pesantren. Khitah 26 dan sikap politik NU merupakan cermin perhatian masyarakat terhadap organisasi Keagamaan yang didukung oleh kekuatan para ulama.

Dhofier (1980) dalam Disertasinya yang telah dibukukan berjudul: Tradisi Pesantren, Studi tentang pandangan hidup kiai, bermaksud menggambarkan dan mengamati perubahan-perubahan

yang terjadi dalam lingkungan pesantren dan Islam tradisional di Jawa, yang dalam periode modern sekarang ini dengan tetap menunjukkan vitalitasnya sebagai kekuatan sosial, Kultural, keagamaan yang turut membentuk bangunan kebudayaan Indonesia modern. Noer (1987) dan Mulkhan (1988) kajiannya lebih menitik beratkan kepada politik santri, dimana santri mempunyai kontribusi dan peran signifikan dalam peta politik Indonesia, santri disini merujuk kepada kalangan Islam taat dan peduli dengan ajaran agama Islam.

Penelitian ini akan memfokuskan pembahasan tentang afiliasi politik yang dibangun kiai pesantren dan implikasinya terhadap eksistensi pesantren. Kemudian dari tema tersebut akan diamati bagaimana bentuk afiliasi yang dilakukan oleh pesantren, proses afiliasi pesantren dan proses serta motivasi yang mendasari afiliasi tersebut, kemudian bagaimana implikasinya terhadap eksistensi pesantren.

Untuk menganalisa tentang afiliasi yang dilakukan oleh kiai pesantren ini, maka akan dilihat dengan teori perilaku. Nicholas Comfort memahami afiliasi sebagai suatu proses organisasi yang mengaitkan dirinya dengan suatu partai politik. Ada beberapa faktor yang diduga telah menjadi penyebab mengapa sebagian masyarakat memilih partai politik tertentu dan mengabaikan parpol yang lainnya, atau mereka berpindah dari partai pilihan sebelumnya ke partai politik baru yang dianggapnya lebih sesuai dengan aspirasi politiknya.

Dalam studi ilmu politik, afiliasi kepartaian lebih mendekati persoalan perilaku memilih (*voting behavior*). Sikap politik massa pemilih dalam menentukan pilihan politiknya biasanya diakibatkan beberapa faktor sebagaimana diyakini oleh (Henderson:1993) perilaku pemilih sangat dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu; faktor sosiologis dan politis. Termasuk didalamnya faktor sosiologi yaitu; umur, tingkat pendidikan, kedekatan dengan partai politik dan pengaruh dari orang tua. Sedang faktor kedua adalah kondisi kenegaraan, kedaerahan, dan kondisi ekonomi. Sementara menurut Afan Gaffar, penjelasan teoritis tentang voting behavior pada umumnya didasarkan pada dua model atau pendekatan yaitu: model pendekatan sosiologis dan model pendekatan psikologi. Model pertama lebih menekankan pada faktor-faktor sosiologis yang membentuk perilaku memilih seseorang. Sementara model kedua lebih mendasarkan faktor-faktor psikologis seseorang dalam menentukan perilaku hegemonic party system (Toekan:2000)

Proses dan motivasi afiliasi politik dan implikasinya terhadap eksistensi pesantren akan dianalisa dari sudut pandang teori idiologi.

Menurut Althusser Idiologi adalah Kepercayaan yang tertanam tanpa disadari. Kepercayaan yang dipoles sedemikian rupa sehingga tidak seperti kepercayaan. Citra ideal yang dikemas seperti fakta dan dipahami sebagai realitas konkrit. Harapan yang kemudian menjelma menjadi petanda konkrit di masa depan. Ideologi bagi Althusser bukanlah 'kesadaran palsu' seperti yang ditegaskan oleh Mark, melainkan sesuatu yang *profoundly unconscious*, sebagai hal-hal yang secara mendalam tidak disadari. Ideology adalah segala yang sudah tertanam dalam diri individu sepanjang hidupnya; *history turn into nature*, produk sejarah yang seolah-olah menjelma menjadi sesuatu yang alamiah. Sejak buaian hingga kuburan, manusia hidup dengan ideology. Dari ujung kaki hingga ujung rambut, ideology menjadi bagian dari mekanisme pengaturan diri, pengelolaan tubuh dan jiwa. Bagi Althusser, ideology membawa kita bergerak dalam relasi yang tak nyata namun seolah nyata, menerima yang semu seperti nyata, yang fana sebagai abadi. Tetapi, karena sifatnya yang tak disadari, manusia merespon seolah semua itu nyata, menanggapi ilusi sebagai realitas sesungguhnya. Begitu kuat pengaruhnya sehingga ilusi-ilusi tak dapat diabaikan, tak dapat ditolak oleh manusia (<http://kampusciamis.com/content/view/34/42/>)

Idiologi adalah ide-ide yang merupakan senjata bagi berbagai kepentingan sosial yaitu alam pikiran yang teralienasi dari kebenaran sosial yang sebenarnya dari si pemikir. tidak ada pemikiran manusia yang kebal terhadap pengaruh-pengaruh ideologisasi dari konteks sosialnya. Begitu idiologi sudah dianut oleh golongan yang bersangkutan, lalu dimodifikasi sesuai dengan kepentingan yang harus dilegitimasi, seringkali suatu idiologi dianut oleh suatu golongan, karena adanya unsur-unsur teoritis tertentu yang menguntungkan kepentingan mereka. Tiap golongan yang terlibat dalam konflik sosial memerlukan solidaritas, ideologilah yang mempunyai kekuatan untuk menimbulkan solidaritas. (Berger dan Luckmann; 1990:178).

Proses dan faktor-faktor afiliasi politik yang dilakukan pesantren terkait dengan masalah idiologi yang mempengaruhi pemahaman kiai pesantren. Disamping kalkulasi ekonomi politik, maka ada yang juga sesuatu yang menjadi dasar atau prinsip dalam membuat keputusan untuk berafiliasi. Bagi kiai dan pesantren keuntungan ekonomi bukanlah segala-galanya, akan tetapi ada lagi yang lebih penting yaitu idiologi yang menjadi dasar pijakan untuk berafiliasi. Eksistensi pesantren merupakan implikasi yang akan dilihat dan dianalisa dengan tetap menggunakan teori ekonomi politik, karena eksistensi lembaga pada

dasarnya merupakan efek yang diperkirakan muncul sebagai akibat dari dilakukannya afiliasi politik.

Analisis untuk melihat proses dan motivasi afiliasi politik, serta implikasi terhadap eksistensi pesantren akan dilihat dengan menggunakan teori nilai. Teori Nilai membahas dua masalah yaitu masalah Etika dan Estetika. Etika membahas tentang baik buruknya tingkah laku manusia sedangkan estetika membahas mengenai keindahan. Ringkasnya dalam pembahasan teori nilai ini bukanlah membahas tentang nilai kebenaran walaupun kebenaran itu adalah nilai juga. Pengertian nilai itu adalah harga dimana sesuatu mempunyai nilai karena dia mempunyai harga atau sesuatu itu mempunyai harga karena ia mempunyai nilai. Dan oleh karena itu nilai sesuatu yang sama belum tentu mempunyai harga yang sama pula karena penilaian seseorang terhadap sesuatu yang sama itu biasanya berlainan. Bahkan ada yang tidak memberikan nilai terhadap sesuatu itu karena ia tidak berharga baginya tetapi mungkin bagi orang lain malah mempunyai nilai yang sangat tinggi karena itu sangatlah berharga baginya.

Secara singkat definisi etika dan moral adalah suatu teori mengenai tingkah laku manusia yaitu baik dan buruk yang masih dapat dijangkau oleh akal. Moral adalah suatu ide tentang tingkah laku manusia (baik dan buruk) menurut situasi yang tertentu. Jelaslah bahwa fungsi etika itu ialah mencari ukuran tentang penilaian tingkah laku perbuatan manusia (baik dan buruk) akan tetapi dalam prakteknya etika banyak sekali mendapatkan kesukaran-kesukaran. Hal ini disebabkan ukuran nilai baik dan buruk tingkah laku manusia itu tidaklah sama (relatif) yaitu tidak terlepas dari alam masing-masing. Namun demikian etika selalu mencapai tujuan akhir untuk menemukan ukuran etika yang dapat diterima secara umum atau dapat diterima oleh semua bangsa di dunia ini. Perbuatan tingkah laku manusia itu tidaklah sama dalam arti pengambilan suatu sanksi etika karena tidak semua tingkah laku manusia itu dapat dinilai oleh etika.

Estetika dan etika sebenarnya hampir tidak berbeda. Etika membahas masalah tingkah laku perbuatan manusia (baik dan buruk). Sedangkan estetika membahas tentang indah atau tidaknya sesuatu. Tujuan estetika adalah untuk menemukan ukuran yang berlaku umum tentang apa yang indah dan tidak indah itu. Yang jelas dalam hal ini adalah karya seni manusia atau mengenai alam semesta ini (Sumedi dkk: 2008)

Afiliasi politik pesantren yang dibangun kiai tidak bisa dilepaskan dari unsur nilai. Penilaian proses dan motivasi yang

mendorong afiliasi politik yang dilakukan kiai berada dalam bingkai penilaian, maka untuk mengukur nilai baik dan buruk sangat subjektif, tergantung dari kesepakatan yang dibangun dalam suatu budaya tertentu. Eksistensi pesantren sebagai sebuah implikasi dari afiliasi politik juga tergantung dari penilaian, sehingga yang berhak memberikan penilaian adalah suatu kebaikan dan keburukan yang sudah disepakati oleh komunitas pesantren An-Nawawi.

Metode Penelitian

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan wawancara, observasi atau pengamatan, dan dokumentasi. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan wawancara tidak terstruktur, sesuai dengan urutan wawancara, dan tidak memakai sistem angket atau kuesioner. Teknik wawancara mendalam berguna untuk memperoleh data dengan jalan mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang segala sesuatu kepada informan, untuk mendapatkan penafsiran yang utuh tentang suatu informasi. Untuk memperoleh validitas data, wawancara dilakukan secara berulang terhadap informan yang berbeda dengan item atau masalah yang sama. Dengan demikian, diharapkan data-data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan validitasnya. Wawancara dilakukan terhadap pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang difokuskan oleh peneliti.

Dalam penelitian ini juga dilakukan studi pustaka, dengan menganalisa literature-literatur yang terkait dengan permasalahan, seperti: buku-buku, jurnal, hasil penelitian ilmiah, surat kabar dan sebagainya. Penelitian ini juga dilakukan dengan pengumpulan dokumen-dokumen, arsip, dan website.

Proses analisa data dimulai dengan menelaah informasi atau data yang telah didapat, baik yang diperoleh dari wawancara, pengamatan, ataupun dari studi terhadap dokumen-dokumen. Keseluruhan data yang di dapat tersebut dirangkum dan dikategorisasikan sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian. Selanjutnya, kategori-kategori yang telah diklasifikasikan tersebut dikonstruksikan ke dalam sebuah deskripsi untuk kemudian dianalisis sehingga dimungkinkan untuk mendapatkan kesimpulan yang utuh.

Letak Geografis Pesantren

Pesantren An-Nawawi Berjan berada Kabupaten Purworejo, sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Ibukota berada di kota Purworejo. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Wonosobo

dan Kabupaten Magelang di utara, Kabupaten Kulon Progo (Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di timur), Samudra Hindia di selatan, serta Kabupaten Kebumen di sebelah barat. Bagian selatan wilayah Kabupaten Purworejo merupakan dataran rendah. Bagian utara berupa pegunungan, bagian dari Pegunungan Serayu. Di perbatasan dengan DIY, membujur Pegunungan Menoreh. Purworejo berada di jalur utama lintas selatan Pulau Jawa. Kabupaten ini juga dilintasi jalur kereta api, dengan stasiun terbesarnya di Kutoarjo.

Kabupaten Purworejo terdiri atas 16 kecamatan, yang dibagi lagi atas sejumlah desa dan kelurahan. Pusat pemerintahan berada di Kecamatan Purworejo. Alun-alun Purworejo, seluas 6 hektar, konon adalah yang terluas di Pulau Jawa. Aktivitas ekonomi kabupaten ini bergantung pada sektor pertanian, di antaranya padi, jagung, ubi kayu dan hasil palawija lain. Sentra tanaman padi di Kecamatan Ngombol, Purwodadi dan Banyuwirip. Jagung terutama dihasilkan di Kecamatan Bruno. Ubi kayu sebagian besar dihasilkan di Kecamatan Pituruh.

An-Nawawi adalah sebuah pesantren yang berdiri di tengah-tengah masyarakat agamis, tepatnya berada di pedukuhan Berjan, desa Gintungan, kecamatan Gebang kabupaten Purworejo. Gintungan merupakan desa yang relative masih hijau disekelilingnya terhampar sawah yang masih luas. Karena memang masyarakat desa Gintungan mayoritas pekerjaannya adalah petani. Data kependudukan yang diperoleh dari arsip desa Gintungan diperoleh bahwa, masyarakat di desa ini berjumlah 2791, dengan rincian, penduduk berjenis kelamin laki-laki 1386 orang dan penduduk yang berjenis kelamin perempuan 1405 orang, jumlah itu terbagi menjadi 70 kepala keluarga (Data Demografi desa Gintungan:2009)

Ditinjau dari posisinya, desa Gintungan dibatasi lima desa dari empat arah, Di sebelah barat berbatasan dengan desa Seren, di sebelah timur berbatasan dengan desa Bulus dan desa Miranti, di sebelah utara berbatasan dengan desa rendeng, dan di sebelah selatan berbatasan dengan desa Lugosobo.

Jalur transportasi dari desa Gintungan ke tempat-tempat penting dipastikan tersedia kendaraan umum. Adapun jarak ke ibu kota kecamatan kurang lebih 4 kilometer, sedangkan jarak tempuh ke ibu kota kabupaten kurang lebih 3,5 kilometer dan jarak ke ibu kota propinsi kurang lebih 125 km. (wawancara dengan Jainal Abidin, 7 Desember 2009). Desa Gintungan masih berada dalam kategori masyarakat agraris, karena sebagian besar mata pencaharian penduduknya adalah petani dan buruh tani, namun akhir-akhir ini buruh pabrik jumlahnya terus

meningkat, sedangkan untuk jumlah profesi PNS, pedagang, dan wiraswasta, masih dibawah profesi tani dan buruh tani. Untuk perinciannya apat dilihat sebagai berikut; petani 417 orang, buruh tani 754 orang, PNS 38 orang, pedagang 26 orang, buruh pabrik 512 orang, sedangkan wiraswasta 25 orang (data demografi desa Gintungan, 2009).

Sejarah Berdirinya Pesantren An-Nawawi

Pondok Pesantren An – Nawawi Berjan, Desa Gintungan, Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo didirikan pada tahun 1870 M oleh Al Marhum Al Maghfurlah KH. Zarkasyi dengan nama “Mafatihul ‘Ulum”. KH. Zarkasyi adalah putra dari Ky.Asnawi dan dilahirkan di desa Tempel Tanggul, Sidomulyo Purworejo. Beliau memperoleh pendidikan agama sejak kecil dari orang tuanya, dan setelah menginjak dewasa beliau meneruskan belajar di pesantren Bangil Jawa Timur. Setelah beberapa tahun belajar di pesantren Bangil kemudian KH. Zarkasyi melanjutkan pendidikannya dengan pergi ke Makkah untuk berguru kepada KH. Abdul Karim Banten Jawa Barat (Beliau adalah paman Syaikh Nawawi Banten), ilmu yang diperoleh adalah Ilmu Thoriqoh yang dikenal dengan Thoriqoh Qodiriyyah wa Naqsyabandiyyah. Sepulang dari Makkah KH. Zarkasyi kemudian berguru kepada K. Sholeh di Darat Semarang untuk memperdalam ilmu bidang Syari’at. Di samping menjadi guru dari KH. Zarkasyi, K. Sholeh Darat adalah juga teman belajar Thoriqoh ketika masih di Makkah.

Setelah bertahun – tahun memperdalam ilmu di berbagai pondok pesantren, kemudian beliau bermukim di Desa Dunglo, Baledono, Purworejo. Kemudian oleh Syaikh Sholeh Darat dianjurkan untuk mendirikan masjid di Dukuh Berjan dengan membekali dua buah batu bata merah. Dan mulai saat itulah berdiri sebuah masjid yang lambat laun berkembang menjadi sebuah pondok pesantren sampai saat ini.

Kemudian pada sekitar tahun 1960, Kepala Pondok waktu itu (Bp. Najmuddin) bermusyawarah dengan para pengurus tentang nama pondok yang lafalnya terdiri dari lafal jama’ semua. Maka mereka mengambill keputusan merubah nama Pondok Pesantren menjadi “Maftahul Ulum” atas persetujuan pengasuh (KH. Nawawi). Pada tahun 1965, sewaktu kepemimpinan dilanjutkan oleh KH. Nawawi, bin KH. Shiddieq bin KH. Zarkasyi, nama pondok pesantren diganti dengan nama “ Roudlotut Thullab “ yang berarti Taman Pelajar atau Taman Siswa, dan kemudian pada tanggal 7 Januari 1996, bertepatan dengan tanggal 16 Sya’ban 1416 H, kembali diganti menjadi “ An – Nawawi “ seperti yang kita kenal sekarang ini. Nama terakhir ini dipilih, karena

2 (dua) alasan pokok, yaitu : Pertama, dalam rangka tafaulan (mengharap barokah) kepada muasis atau pengasuh ke – tiga pondok pesantren, Al Marhum Al Maghfurlah KH. Nawawi bin Shiddieq. Kedua, Sebagai tonggak sejarah bahwa pada masa KH. Nawawi inilah, sistem atau metode pengajaran dikenalkan kepada sistem madrasi atau dalam dunia pendidikan modern dikenal dengan istilah klasikal.

Pondok Pesantren ini sejak awal berdirinya sampai sekarang telah mengalami 4 (empat) kali estafet kepemimpinan. Periode pertama, kepemimpinan pondok pesantren dipegang langsung oleh pendirinya, yaitu Al Marhum Al Maghfurlah KH. Zarkasyi. Pada masa ini, sebagaimana layaknya sebuah pondok pesantren, diawali dengan dibangunnya sebuah surau sederhana terbuat dari bambu. Santri yang mengaji pun masih terbatas dari lingkungan sekitar. Karena itu, Sistem pendidikan yang diterapkan masih berkisar pada pokok – pokok dasar 'Ubudiyyah (peribadatan) dan berbagai pengetahuan praktis lainnya, yang diantaranya bersumber pada kitab Majmu' Lathoifut Thoharoh, karya gurunya sendiri, Syech Sholeh Darat.

Setelah KH. Zarkasyi wafat, maka kepemimpinan pondok pesantren dilanjutkan oleh putranya yang bernama KH. Shiddieq. Sejalan dengan kedudukan beliau yang bukan hanya sebagai pengasuh pondok pesantren, akan tetapi juga dikenal sebagai Mursyid Thoriqoh Qodiriyyah Wa Naqsyabandiyyah, maka keberadaan pondok pesantren (Waktu itu masih Miftahul Huda) lambat laun mulai berkembang dan juga semakin banyak pula santri yang datang dari luar daerah untuk berguru kepada beliau KH. Shiddieq.

Pada kepemimpinan periode ketiga pondok pesantren dipimpin oleh salah seorang putra KH. Shiddieq, yang bernama KH. Nawawi.

Semenjak kecil, KH. Nawawi hidup dan dibesarkan dalam lingkungan pondok pesantren. Beberapa pondok pesantren tempat beliau berguru antara lain, Pondok Pesantren Termas Kediri, Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, Pondok Pesantren Darus Salam Watucongol Magelang, Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta, dan Pondok Pesantren lain di Jawa.

Idiologi Politik

Proses dan faktor-faktor afiliasi politik yang dilakukan pesantren terkait dengan masalah idiologi yang mempengaruhi pemahaman kiai pesantren. Disamping kalkulasi ekonomi politik seperti yang disampaikan diatas, maka ada yang juga sesuatu yang menjadi dasar keputusan

untuk berafiliasi. Bagi kiai dan pesantren keuntungan ekonomi bukanlah segala-galanya, akan tetapi ada lagi yang lebih penting yaitu ideologi yang menjadi dasar pijakan untuk berafiliasi dengan partai Golkar. Filosofi K.H. Achmad Chalwani sendiri adalah "Menjadi hamba Allah yang diridloi di dunia dan akhirat dan bermanfaat bagi sesama umat", beliau mempunyai harapan agar semua komponen bangsa bersatu, bahu membahu mewujudkan Indonesia yang maju, sejahtera dan diperhitungkan dalam percaturan internasional. Untuk itu diperlukan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (Tim PP An-Nawawi, 2008: 168)

Partai Golkar dalam platformnya menjunjung tinggi ajaran agama, yang dalam gerak langkahnya senantiasa mendasarkan pada nilai-nilai etika dan moralitas berdasarkan agama. Etika dan moralitas adalah saripati ajaran agama dan buah dari keberagamaan itu sendiri. Bagi Golkar agama menduduki posisi yang sangat penting dan harus diutamakan. Dengan demikian seluruh langkah perjuangan senantiasa dilandasi nilai-nilai etika dan moralitas berdasarkan agama. Selanjutnya, partai Golkar mengutamakan pembangunan hukum untuk keadilan dan tegaknya HAM. Dalam kerangka ini, maka harus diupayakan tegaknya supremasi hukum karena Indonesia adalah Negara hukum. Lebih dari pada itu, supremasi hukum harus diletakan sebagai pilar utama, dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang demokratis, konstitusional berdasarkan hukum (Tanjung, 2007: 386-387)

Bila diamati dari pandangan tentang persoalan-persoalan keagamaan dan kenegaraan diatas antara pemikiran KH. Achmad Chalwani dan Platform partai Golkar, maka akan ditemukan banyak kesamaan-kesamaan pemikiran, pertama, ada kesepakatan untuk meletakkan dan mengedepankan agama sebagai landasan perjuangan yang harus diutamakan, kedua, punya kesamaan untuk menyatukan komponen bangsa dengan bahu membahu untuk mewujudkan kesejahteraan dan terciptanya supremasi hukum, sehingga menjadi negara bangsa yang berwibawa.

Eksistensi partai Golkar yang bertahan sampai sekarang merupakan tanda, betapa Golkar merupakan partai yang konsis dengan perjuangannya. Akbar Tanjung adalah tokoh dibalik perjuangan itu, seorang politikus cerdas dan piawai, konsisi dan profesional dalam berorganisasi untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat. Akbar Tanjung juga merupakan sosok pemimpin Golkar yang teguh dengan penampilan tenang dan persuasive, pandai melakukan komunikasi-komunikasi politik dengan akomodatif.

Di bawah kepemimpina Akbar Tanjung dengan paradigma barunya, Golkar terus berjuang membangun citra positif, Partai Golkar menawarkan pembaharuan mulai dari visi, misi, dan Platform partai yang bernilai demokratis, kesetaraan, kerakyatan dan kebangsaan yang plural. Konsistensi, professional, dan Komunikasi persuasive ala Akbar Tanjung menjadi daya pikat tersendiri bagi kiai, yang kemudian dijadikan idiologi dan rujukan tersendiri dalam kegiatan politiknya. Kiai sendiri merupakan orang yang konsis sejak tahun delapan puluhan untuk tetap berafiliasi dengan partai Golkar, perkembangan politik pasca reformasi yang mendorong pesantren-pesantren lainnya untuk mendukung partai-partai Islam Seperti PKB, PAN, PKNU, PPP, dan partai Islam lainnya, ternyata tidak menggoda kiai untuk berubah halauan ikut-ikutan berpindah ke partai-partai berbasis Islam. Kiai mempunyai kesefahaman dengan Akbar Tanjung dan fungsionaris partai Golkar lainnya, yang dengan gigih mempertahankan dan mendukung partai Golkar.

Profesionalitas partai Golkar ini diakui oleh kiai. Prinsip kiai mendukung Golkar karena Golkar punya profesionalitas dalam berpolitik dan mengelola partai, pada saat ini ada orang yang tidak punya profesi politik tetapi terjun ke dunia politik, untuk menempatkan sesuatu pada tempatnya, maka harus mendukung orang yang punya profesi politik dan ahlinya (wawancara dengan Ustadz Muhlil Musholin, 1 Desember 2009). Pentingnya profesionalitas merupakan suatu pandangan yang sama antara Golkar dengan kiai, karena kesamaan pandangan itulah kemudian menimbulkan kecocokan dalam berafiliasi.

Akbar Tanjung dengan kelihaihan dan kemampuannya dalam berpolitik, dan ditunjang dengan gaya bicaranya yang tenang dan tidak berapi-api, akbar juga kerap melakukan manufer-manufer politik dengan komunikasi persuasif yang sangat akomodatif, hal ini menjadi daya tarik tersendiri bagi kiai, sehingga dalam suatu acara kunjungan Akbar Tanjung ke pesantren An-Nawawi, kiai pernah menunjukkan kekaguman terhadap kepiawaian dan ketenangan Akbar Tanjung dalam berpolitik, dengan mengatakan: "Selamat datang guru ilmu politik saya," ujarnya di hadapan ribuan jamaah Thoriqoh Qodiriyah/Naqsyabandiyah dalam rangka memperingati Haul Syaikh Abdul Qodir al-Jaelani, Minggu (20/4). Sapaan selamat datang kepada Akbar Tandjung itu disampaikan dari atas podium saat Akbar Tandjung berada di tengah-tengah kerumunan jamaah yang berebut untuk beruluk salam. Selanjutnya, Akbar Tandjung duduk di deretan kursi paling depan, di depan panggung utama. (<http://www.bangakbar.com/news/1/tahun/2008/bulan/04/tanggal/20/id/237/index.html>)

Pembahasan Koordinatif

Afiliasi politik yang dibangun kiai tidak begitu terang-terangan menampakan bentuknya, akan tetapi afiliasi ini sifatnya dukungan secara moral, meskipun dukungan secara moral namun, semua masyarakat sudah tahu kalau kiaiinya memilih untuk mendukung Golkar. Dukungan kiai dalam kemenangan Golkar dalam berbagai pilihan dilakukan oleh kiai sendiri tanpa dibantu oleh pihak Golkar, kiai mempunyai cara-cara sendiri dalam merekrut masyarakat, ketika melakukan upaya dukungan jamaah, kiai tidak membutuhkan bantuan pihak Golkar (wawancara dengan staf pengurus Golkar DPD Tk. II Purworejo, 7 Desember 2009), namun sebagai suatu partai politik yang profesional koordinasi itu tetap ada meskipun tidak formal, kontak-kontak antara pengurus Golkar tetap ada meskipun paling tidak untuk menghindari kesalahan fahaman dalam menyikapi berbagai isu politik yang berkembang. Peristiwa-peristiwa politik atau berita politik terkadang muncul dengan berbagai rumor yang tidak bias dipertanggungjawabkan, maka harus ada penyikapan bersama, agar tidak menimbulkan perbedaan yang justru akan menimbulkan konflik dan keresahan.

Secara formal, kiai tidak tercatat di dalam struktur kepengurusan Golkar di tingkat kabupaten, namun kiai mempunyai posisi yang sangat kuat karena pengaruhnya yang sangat besar di masyarakat, meskipun kiai tidak ikut secara aktif terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Golkar, namun kiai tetap melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan partai Golkar sampai ke tingkat pusat, hal ini dibuktikan dengan seringnya kunjungan petinggi partai Golkar ke pesantren An Nawawi, diantaranya adalah Akbar Tanjung, Agung Laksono, dan lain-lain. Akbar Tanjung sendiri tercatat sudah ke enam kalinya berkunjung ke pesantren ini. Sepanjang tahun 1998-2004 Akbar Tanjung rajin-rajinnya melakukan konsolidasi politik partai Golkar, antara lain dilakukan dengan berbagai interaksi dengan lapisan akar rumput, terutama para kader partai tingkat kabupaten dan kota. Upaya yang dilakukan Akbar Tanjung dan pengurus DPP partai Golkar tersebut amat penting dalam rangka mempertahankan eksistensi partai, terutama dalam rangka penguasaan basis partai hingga ke kabupaten-kabupaten dan pedesaan, upaya Akbar Tanjung tersebut dalam rangka memotivasi para kader Golkar di berbagai tempat, agar tidak mengalami demoralisasi, akibat banyaknya tekanan terhadap partai Golkar (Tanjung, 2007: 112).

Untuk keperluan tertentu kiai juga melakukan kunjungan ke kantor DPD Purworejo, namun frekwensi kunjungannya sangat kecil. Dibanding kunjungan para petinggi Golkar ke pesantren An-Nawawi

Berjan ini. Kaitannya dengan partai Golkar, kiai membantu dengan pengaruhnya untuk mendapatkan perolehan suara dalam lingkungan komunitasnya, namun secara tidak langsung kiai juga tetap punya pengaruh dan peran terhadap Golkar, kiai sebagai orang yang selalu membawa misi moral, maka paling tidak kiai juga akan ikut menjaga etika dan moral politik yang dilakukan Golkar. Kiai juga mempunyai hubungan dengan para pengurus Golkar mulai tingkat daerah sampai ke pusat ini dibuktikan dengan seringnya kunjungan para petinggi Golkar ke pesantren An-Nawawi Berjan ini.

Dukungan terhadap Golkar

Sejak kiai memberikan dukungan terhadap partai Golkar, sejak itu pula terbangun keterkaitan-keterkaitan yang tidak bisa dihindari oleh seorang kiai. Pemikiran dan perhatian kiai juga tidak akan lepas dari perhatian orang, dan kiai juga akan menyampaikan pesan-pesan itu dalam beberapa kesempatan yang dianggap akan mempengaruhi suara Golkar. Meskipun afiliasi politik kiai hanya sebatas moral, namun pesan-pesan politisi menjadi suatu agenda tersendiri yang menjadi perhatian kiai dalam berbagai kesempatan tertentu, upaya-upaya untuk kemenangan partai juga akan ada, meskipun kiai sendiri tidak menjadi jurkam resmi Golkar, karena dia menggunakan cara-cara sendiri dengan berbagai kekhasannya.

Dukungan para Pengurus dan Ustadz di pesantren An Nawawi diakui memang ada, namun Para ustadz dan pengurus ini tidak melakukan pengaruh-pengaruh politik terhadap anak-anak didiknya. Mereka hanya berperan memfasilitasi dan membantu penyebaran brosur, dan perangkat-perangkat promosi yang akan disampaikan kepada masyarakat di lingkungan pesantren, mereka juga memper-silakan kader-kader dan caleg dari Golkar untuk datang ke tempat mereka (wawancara dengan Muhlil Musholin, pengurus Pesantren, 1 Desember 2009).

Partisipasi pengurus dan ustadz pesantren dalam kegiatan Golkar secara formal tidak begitu signifikan, akan tetapi secara moral mereka kebanyakan juga mendukung terhadap apa yang dilakukan oleh kiaiinya dalam berafiliasi dengan Golkar. Bentuk afiliasinya adalah partisipasi pasif, tapi tetap mendukung. Dalam penyebaran informasi pengurus juga punya cara tersendiri, yang tidak sama seperti yang dilakukan pendukung Golkar secara umum. Hubungan pengurus pesantren cukup baik, mereka sering mengobrol dengan warga masyarakat sekitar (wawancara dengan Ponijan, Kasun Berjan, 7 Desember 2009), namun

hubungan itu tidak dimanfaatkan oleh pengurus untuk mempengaruhi masyarakat dalam menentukan pilihan politiknya, pengurus faham betul, bahwa pengaruh kiai sudah cukup untuk mempengaruhi mereka dalam menentukan pilihan politiknya.

Para pengurus dan ustadz sementara ini belum terlihat dan terbukti ada yang duduk di kepengurusan Golkar, walaupun mereka sering bergaul dengan para kader Golkar yang kebetulan berkunjung ke pesantren. Lagi-lagi hubungan mereka adalah sebatas hubungan moral yang tidak punya ikatan formal secara politis. Dukungan mereka terhadap Golkar selama ini sebagai takdim terhadap kiai, mereka mendukung afiliasi atas pemahaman yang mereka peroleh dari kiaiinya dan kebetulan mereka pun kebanyakan sependapat dengan kiaiinya.

Keterkaitan alumni terhadap afiliasi dengan Golkar ini terlihat jelas ketika dalam pemilihan Kepala Daerah kabupaten Purworejo tahun 2005. Saat itu Golkar mengusung pasangan calon bupati H. Kelik Sumrahadi dan calon Wakil bupatinya kebetulan adalah alumni pesantren An-Nawawi berjan yairu: Drs. HR. Mahsun Zain. Golkar secara penuh mendukung pasangan ini, begitu juga keluarga besar Pesantren termasuk alumni. Setelah terpilih wakil bupati dari alumni pesantren inilah maka terlihat bahwa, keterkaitan itu tidak dapat dielakan karena ada kepentingan bersama dalam berafiliasi.

Para alumni yang mencalonkan diri dari partai Golkar juga akan mendapatkan perhatian tersendiri dari pesantren, contohnya adalah K.H. Abdul Jalil yang mencalonkan dari Partai Golkar, dan kemudian di dukung oleh kiai. (wawancara dengan Mohammad Arwani, Alumni dan Kasek MTs. An-Nawawi 6 Desember 2009). Dengan bertambahnya alumni yang masuk ke jajaran afiliasi Golkar maka afiliasi itu akan semakin menampakkan bentuknya.

Kiai sebagai tokoh kharismatik dan berpengaruh di masyarakatnya mempunyai peran penting dalam membantu mempengaruhi massa dalam berbagai even pemilihan seperti; pemilu legislative, pemilu presiden maupun pilkada, tentu saja dengan gaya, cara dan pendekatan tersendiri. Golkar sendiri tidak turut campur dengan kegiatan kiai dalam mempengaruhi massa, karena keterlibatan Golkar dalam kegiatan kiai ini justru akan merusak rencana-rencana dan strategi yang akan digunakan kiai, Golkar sudah mempercayakan upaya kemenangan Golkar terhadap kiai, dalam lingkungan komunitasnya (Wawancara dengan Staf Pengurus Golkar DPD Tk.II Purworejo 7 Desember 2009).

K.H.Achmad Chalwani dalam kapasitasnya sebagai pengajar yang selalu mengisi pengajian di masyarakat dengan undangan maupun pengajian di pesantrennya dengan kelompok Thoriqot, kelompok ini dihadiri oleh masyarakat yang datang berduyun-duyun dari berbagai tempat, baik dari lingkungan desa Gintungan sendiri maupun dari daerah lain. Kelompok pengajian ini cukup eksis disukai dan didukung masyarakatnya, momen ini cukup strategis karena rutinitas pertemuan dengan masyarakat jamaah cukup intensif. Dalam momen inilah kiai mempunyai kesempatan untuk mempengaruhi masyarakat dalam menentukan pilihan politiknya. Ajakan untuk memilih Golkar memang tidak terang-terangan, karena kiai sangat memperhatikan etika, kiai hanya menerangkan kepada jamaah pengajian tentang kriteria partai dan calon yang hendak dipilih, kemudian dia sendiri menentukan pilihannya (wawancara dengan H. Ali Sodikin, S.Pd, 1 Desember 2009).

Hubungan kiai dengan alumni juga masih terjalin dengan baik bahkan, bahkan kiai sangat memperhatikan terhadap alumni pesantren, dimata para alumni kiai dipandang sebagai sosok panutan yang sangat dihormati, taushiyah dan bimbingannya selalu diperhatikan dan dijadikan pedoman dan rujukan dalam kehidupannya, bahkan dalam kegiatan pengajian mingguanpun para alumni masih ada yang menyempatkan untuk mengahdirinya secara rutin. Diyakini pula anjuran-anjurannya akan memberikan pencerahan dalam kehidupannya. Penghormatan alumni yang sedemikian itu, memberikan pengaruh besar terhadap apa yang disampaikan kiai, sehingga apa yang dikatakan kiai akan menjadi panutan. Hal ini juga yang berpengaruh terhadap ajakan kiai dalam menentukan pilihan afiliasi politiknya. Dari sekian banyak alumni perkiraan sebageian besar mereka menyalurkan pilihan politiknya ke Golkar, hanya 25 % saja yang ke partai lain (Wawancara dengan Muhlil Musholin, 1 Desember 2009). Ikatan yang terjalin antara kiai dengan alumni pesantren, merupaakn hubungan moral dan kebutuhan spiritual, bukan hubungan material yang diyakini akan lebih kuat dan tahan lama.

Para pengurus, guru, ustadz, dan santri, mereka memposisikan diri sebagai santri atau murid yang senantiasa takdim terhadap kiai, sikapnya terhadap kiai sama seperti alumni, hanya saja mereka berinteraksi dan lebih dekat dengan kehidupan kiai dalam kesehariannya. Pengaruh kiai sangat besar terhadap mereka, sehingga apa yang dikatakan kiai hampir dipastikan akan diikuti mereka (derek kiai). Karena kepatuhan inilah kemudian juga akan diikuti dengan kepatuhan dalam menentukan pilihan politiknya. Kiai sebenarnya memberikan

kebebasan kepada mereka, namun karena mereka melihat sosok kiai yang harus dipatuhi akhirnya sebagaimana dari mereka juga menentukan pilihannya ke partai Golkar, ini dibuktikan dengan kemenangan partai Golkar di TPS-TPS lingkungan pesantren (Wawancara dengan Muhlil Musholin, pengurus Pesantren, 1 Desember 2009).

Dasar dan Prinsip Afiliasi dengan Golkar

Ketika menjalankan perannya sebagai lembaga dakwah, pondok pesantren terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama, pesantren yang lebih menitikberatkan pendekatan sosio-kultural. Pesantren ini cenderung “tertutup” dan “tidak bersedia” pesantrennya dikunjungi elite politik dan pejabat pemerintahan. Umpamanya, Pondok Pesantren Sidogiri, Pasuruan. Tradisi yang dibangun para kiai pesantren ini “menutup diri” dari kancah politik, terutama politik praktis.

Kelompok kedua, pesantren yang terbuka kepada politik, bahkan ada pula yang terlibat langsung dengan politik praktis. Kelompok ini membuka pintu (lebar-lebar) kepada para elite politik atau pejabat pemerintahan. Pengasuh pesantren juga bersedia berkunjung ke kediaman mereka.

Paling tidak ada tiga alasan yang melatarbelakanginya. *Pertama*, alasan historis yaitu tradisi yang dirintis pendiri pesantren tersebut memang terbuka kepada siapa saja, termasuk kepada para elite politik dan pejabat teras. Misalnya; Kiai Ahmad Fawaid As'ad, pengasuh PP “Salafiyah Syafi'iyah” Sukorejo Situbondo yang meneruskan tradisi kakek dan abahnya, yang mendirikan pesantren Sukorejo. Kiai Syamsul Arifin —kakek Kiai Fawaid— bersedia menerima kedatangan Van der Plas (Gubernur Hindia Belanda Jawa Timur), Abdul Hamid Ono (pembesar Jepang), dan Panglima Divisi VII Untung Suropati Malang-Besuki. Atau Kiai As'ad —abah Kiai Fawaid— yang menerima elite parpol dan pejabat teras, dari petinggi sampai presiden.

Kedua, alasan teologis. Sebagian kalangan pesantren menganggap politik bisa dijadikan sebagai salah satu alat perjuangan dan mempermudah dakwah mereka. Mereka berpendapat, partai politik sebagai alat perjuangan yang berlandaskan kepentingan umum (*maṣlaḥah al-'ammah*), bukan kepentingan kelompok, apalagi pribadi. Bukankah politik pada hakikatnya adalah seni dalam mengambil keputusan untuk kemaslahatan publik?

Ketiga, alasan strategis-pragmatis. Agar pesantren mempunyai kekuatan dan jaringan dengan kekuasaan. Sebab pesantren yang mempunyai basis massa yang jelas dan kuat, kalau kekuatannya tidak

dimanfaatkan, akan terbuang percuma begitu saja. Karena itu harus ada tawar-menawar politik dan membangun “kontrak politik” dalam pengertian yang sangat pragmatis.

Sebagai lembaga layanan masyarakat, sudah selayaknyalah bila pesantren tidak hanya puas mendengar keluh-kesah rakyat jelata. Pesantren juga dituntut menyampaikan aspirasi umat tersebut ke hadapan umara. Sudah selayaknyalah pengasuh pesantren harus menjembatani kepentingan rakyat dan penguasa. Sehingga kehadiran pesantren membawa manfaat untuk semua pihak; oleh pemerintah, kalangan pesantren tidak dianggap sebagai “pemberontak.” Bagi umatnya, pesantren tidak dicap sebagai “antek” pemerintah (Syamsul A. Hasan dalam <http://islamlib.com/id/artikel/pesantren-dan-politik/>)

Dalam berpolitik, aspek yang perlu ditegaskan adalah perebutan kekuasaan yang dilakukan oleh partai politik hanyalah sebagai sarana saja. Fungsi esensial justru pada bagaimana melakukan manuver taktis dalam mewujudkan kebijakan public yang memihak terhadap kepentingan masyarakat, karena kebijakan public merupakan wujud nyata dari interaksi antara Negara dengan masyarakat. Persefektif semacam inilah yang tampaknya menjadi landasan keterlibatan kiai. Kiai berpolitik itu semata-mata bertujuan untuk ibadah kepa Allah. Tidak ada sama sekali untuk tujuan praktis ataupun material, walaupun ada itu adalah untuk kepentingan lembaga.konsep ibadah ini maknanya sangat luas, yaitu segenap aktifitas seorang muslim yang dilandasi keimanan dan ditujuakn semata-mata untuk mengharap ridla Allah.

Didalam ajaran Islam, segenap aktifitas hidup yang tidak melanggar hukum Allah adalah ibadah. Demikian juga dengan berpolitik kalau tidak melanggar adalah ibadah. Hal ini didasarkan atas doktrin Islam yang tidak memisahkan secara tegas antara kehidupan dunia dan akhirat, berpolitik bagi seorang muslim sesuai dengan syariat. Politik juga menjadi bagian pembahasan dalam syariat. Disamping itu berpolitik juga mempunyai tujuan memberikan benteng moralitas, kehadiran kiai dalam berpolitik diharapkan dapat memberikan sandaran moralitas keagamaan (Patoni, 2009: 163-164)

Afiliasi politik yang dibangun kiai pesantren An-Nawawi berdasarkan beberapa prinsip yang dijadikan landasan pegangan bagi kiai pesantren. K.H. Achmad Chalwani sendiri adalah seorang yang konsis dengan pendiriannya untuk tetap berafiliasi dengan Golkar, kiai tidak ikut-ikutan kesana kemari. Ketika Golkar terpuruk dan

pesantren-pesantren banyak yang berafiliasi kepada partai-partai yang berlabel Islam, maka kiai ini tetap tidak bergeming untuk pindah afiliasi ke partai lain (Wawancara Mohammad Arwani, 6 Desember 2009). Bila dikaitkan dengan Visi pesantren, yaitu; "mempertahankan suatu yang baik dari masa lampau dan mau menerima sesuatu yang lebih baik dari masa sekarang", maka akan ketemu, karena menurut kiai, Golkar adalah partai lama yang sudah berpengalaman dan profesional, jangan membuat kekuatan baru yang pengalamannya belum matang, lebih baik memperkuat yang sudah ada dan matang, percuma membuat kekuatan baru yang tidak mumpuni. (wawancara dengan Ali Sodiqin, pengurus pesantren An-Nawawi, 1 Desember 2009)

Golkar diibaratkan seperti sebuah kekuatan yang harus dikendalikan oleh orang Islam, didalam tubuh Golkar sendiri banyak kader dari Islam yang tingkat ketaatan bagus, maka sayang kalau mereka tidak didukung, siapa lagi kalau bukan orang Islam sendiri yang mendukungnya. Dalam setiap pemilu caleg ataupun pilkada, kiai tidak hanya memperhatikan partainya, tapi juga unsure ke-NU-an dan Pesantrennya menjadi pertimbangan dalam menentukan pilihannya. Kiai juga selalu mempertimbangkan keseimbangan, bila dalam pilkada, calon bupati dari kalangan abangan, maka wakilnya harus dari kalangan santri (wawancara dengan Ali Sodikin, pengurus pesantren, 1 Desember 2009).

Prinsip-prinsip yang menjadi dasar afiliasi tersebut diterima dengan baik oleh para pengurus, ustadz, dan masyarakat, walaupun pada awalnya terjadi resistensi, namun akhirnya semuanya dapat menerima dasar dan alasan tersebut. Menurut Ali Sodikin, yang menyebabkan pamor kiai tetap diakui dan dicintai oleh warga pesantren dan masyarakat sekitarnya adalah karena kiai tidak pasif, akan tetapi aktif menjalin hubungan, sehingga murid-murid merasa diperhatikan. Murid-murid tidak merasa ditinggalkan dan tidak merasa dipaksa untuk mengikuti Golkar. Untuk memilih calon tertentu, kiai biasanya menerangkan lebih dulu criteria masing-masing calon. Sodikin menambahkan bahwa, kiai tidak menjual kekiaiannya untuk politik, akan tetapi, politik ditarik untuk kemajuan umat Islam.

Kepentingan Pesantren

Pesantren An-Nawawi adalah sebuah lembaga yang sedang berkembang, dalam perkembangannya, lembaga itu memerlukan berbagai fasilitas, sarana prasarana, kualitas guru dan sebagainya. upaya untuk memenuhi dan mempertahankan lembaga tersebut perlu di

dukung oleh berbagai aspek, agar lembaga tetap eksis dan dipercaya oleh masyarakat. Afiliasi politik yang dibangun dengan partai Golkar tentunya akan berpengaruh terhadap kemajuan lembaga, meskipun tidak secara langsung Golkar sendiri yang memberi bantuan, akan tetapi afiliasi dengan Golkar akan terbangun jaringan dengan pejabat yang lain. Pesantren An-Nawawi sering dikunjungi para pejabat, bukan hanya pejabat dari Golkar, akan tetapi juga pejabat lain, seperti; kunjungan Menkoinfo M. Nuh, menteri Agama Maftuh Basyuni (wawancara dengan Muhlil Musholin, pengurus pesantren, 1 Desember 2009). Sudah menjadi tradisi bagi para menteri dalam setiap kunjungannya selalu memberi bantuan kepada lembaga atau institusi yang dikunjungi.

Keterlibatan kiai dalam partai politik membawa implikasi terhadap pesantren secara kelembagaan dan terhadap kiai sendiri. Keterlibatan ini terlihat juga dalam perubahan sarana fisik pesantren. Azas manfaat yang digunakan oleh semua kiai rupanya tidak sia-sia. Bantuan material dan non material kerap kali datang ke pondok pesantren sebagai sebuah konsensus-konsensus politik yang dilakukannya. Posisi semua kiai dalam berpolitik berimplikasi dan ditujukan bagi pembangunan pesantren yang mereka miliki (Patoni, 2007: 173)

Kepentingan Masyarakat

Sebagai pemimpin Islam non formal, kiai adalah orang yang diyakini penduduk desa mempunyai otoritas yang cukup besar dan kharismatik. Hal ini karena kiai adalah orang suci yang dikaruniai berkah. Karena tipe otoritas ini berbeda "diluar keidupan dunia rutindan profane sehari-hari (Weber, 1973: 53), maka kiai dipandang mempunyai kelebihan-kelebihan luar biasa yang membuat kepemimpinannya diakui secara umum, disamping kelebihan-kelebihan personalnya. Otoritas kiai dan hubungan akrabnya dengan masyarakat, telah dibentuk oleh kepedulian dan orientasinya kepada kepentingan-kepentingan umat Islam. Para penduduk desa yang biasa menyebut diri mereka wong cilik atau orang awam, sadar bahwa mereka tidak mempunyai pengetahuan cukup untuk memahami peristiwa-peristiwa yang terjadi pada tingkat nasional. Hubungan yang dekat antara kiai dengan penduduk desa kemudian menempatkan kiai sebagai penerjemah, yang memberikan penjelasan-penjelasan dalam kontek agama dan mengklarifikasi berbagai masalah bangsa pada umumnya. Posisi menonjol kiai ini lebih nampak ketika partai poltiik secara inten memasuki masyarakat jawa. Ini terjadi karena kiai sendiri adalah bagian

dari elit politik, suatu posisi strategis dan diklaim mempunyai kekuasaan yang sah untuk mempersatukan umat dalam menghadapi berbagai ancaman yang nyata dari kelompok-kelompok lain (Turmudi; 2004:2)

Pengaruh dan kedekatan kiai dengan masyarakat yang begitu dekat, memungkinkan kiai untuk selalu memikirkan kepentingan dan kebutuhan masyarakat dan santrinya, sehingga afiliasi politik yang dibangun kiai juga tidak akan lepas dari kepentingan Islam dan Masyarakat. Pilihan-pilihan kiai terhadap calon pemimpin dalam setiap kesempatan, akan didasarkan kepada karakteristik orangnya yang dimungkinkan akan mau dan mampu berjuang untuk kepentingan umat atau masyarakat luas. Hal ini berkaitan dengan salah satu tujuan berdirinya pesantren An-Nawawi yaitu; menyebarkan misi Islam melalui dakwah yang bertanggung jawab terhadap masyarakat luas (Pedoman Kerja Pengurus Pesantren An-Nawawi Berjan; 2009:4)

Motivasi Afiliasi Politik

Perilaku seseorang itu pada dasarnya ditentukan oleh berbagai kebutuhan untuk mencapai tujuan. Perilaku itu terjadi karena adanya dorongan-dorongan dari apa yang ia pikirkan, percaya dan apa yang ia rasakan. Dorongan-dorongan itulah yang dinamakan motivasi. Keinginan social yang terdapat pada diri setiap orang adalah keinginan untuk bergabung (berafiliasi). Keinginan itu sesuai dengan kodrat manusia sebagai makhluk social yang tidak mungkin hidup tanpa berafiliasi dengan makhluk atau individulainnya. Keinginan bergabung sering bercampur dengan keinginan lainnya, seperti keinginan akan penghargaan atau prestise. Biasanya kebutuhan ini menjadi kebutuhan yang paling penting didalam diri seseorang dalam kehidupannya. Maksud bergabungnya satu individu dengan individu lain adlah untuk mencapai suatu tujuua yang menjadi harapannya dengan berdasarkan pengalaman-pengalaman yang dianggapnya kurang memuaskan.

Ada beberapa macam motivasi atau kebutuhan yang ada pada setiap manusia diantaranya adalah: kebutuhan untuk berafiliasi, kebutuhan untuk memiliki dan memperoleh sesuatu, kebutuhan akan prestise, kebutuhan untuk emmbantu, dan kebutuhan untuk mengetahui sesuatu (Krech, 1995: 82). Afiliasi politik yang dilakukan kiai pesantren merupakan bagian dari motivasi/kebutuhan untuk berhubungan dengan orang lain yang didasarkan atas bebrapa kesamaan seperti persepsi, idiologi, dan kepentingan kiai pesantren. Motivasi untuk berafiliasi bagi kiai didorong juga oleh factor pendidikan dan pengalaman kiai,

perubahan dinamika politik, dan menyikapi terhadap kebutuhan-kebutuhan masyarakat.

Citra dan Pengaruh Kiai

Citra adalah kesan yang diperoleh seseorang berdasarkan pengetahuan dan pengertiannya tentang fakta-fakta atau kenyataan. Untuk mengetahui citra seseorang terhadap obyek dapat diketahui dari sikapnya terhadap obyek tersebut. Solomon dalam Rakhmat, menyatakan semua sikap bersumber pada organisasi kognitif, pada informasi dan pengetahuan yang kita miliki. Tidak akan ada teori sikap atau aksi sosial yang tidak didasarkan pada penyelidikan tentang dasar-dasar kognitif. Efek kognitif dari komunikasi sangat mempengaruhi pembentukan citra (Danasaputra, 1995: 34-35). Proses pembentukan citra pada akhirnya akan menghasilkan sikap, pendapat, tanggapan atau perilaku tertentu terhadap seseorang. Penelitian citra dalam upaya membentuk sikap positif publik akan memberi informasi untuk mengevaluasi kebijakan, memperbaiki kesalahfahaman, menentukan daya tarik pesan Hubungan Masyarakat, dan meningkatkan citra humas dalam pikiran publik.(Haney dalam Danasaputra, 1995 : 37)

Citra seseorang dapat diukur dari seberapa besar pemahaman orang lain yang mempunyai kepentingan bersama dalam suatu komunitas tertentu, citra juga dapat diukur dengan sikap, pendapat, atau perilaku orang lain terhadap seseorang. Untuk mengukur citra positif kiai, maka dapat dilihat dari sikap, tanggapan, dan perilaku santri, ustadz, dan komunitas masyarakat pesantren terhadap kiai. Dari pengamatan yang sudah dilakukan, diketahui bahwa, sikap, tanggapan mereka terhadap kiai masih tetap bagus (positif), mereka masih sangat menghormati kiai, mereka masih memberikan tanggapan positif terhadap kiai, dan berperilaku sangat hormat terhadap kiai.

Afiliasi politik yang dibangun kiai ternyata tidak merubah citra kiai, kiai masih dianggap sebagai tokoh yang menjadi panutan bagi publiknya. Afiliasi kiai dengan Golkar dianggap sebagai ijtihad politik yang tidak perlu dipertentangkan. Pada masa awal kiai berafiliasi dengan Golkar sempat terjadi resistensi dari suatu masyarakat tertentu, namun karena pendekatan dan cara penyampaian kiai cukup bisa dimengerti, maka pada akhirnya, semua dapat menerima dan memahami alasan kiai untuk berafiliasi dengan Golkar (wawancara dengan Mohammad Arwani, Alumni Pesantren dan Kasek MTs. An-Nawawi, 6 Desember 2009).

Afiliasi politik yang dibangun juga tidak mengurangi pengaruh kiai, ceramah atau tausyiahnya masih diperhatikan oleh jamaah dan masyarakatnya (wawancara dengan Muhlil Musholin, pengurus Pesantren An-Nawawi, 1 Desember 2009). kenyataan ini dibuktikan dengan masih membludaknya jamaah Tariqat dan jamaah pengajian mingguan di pesantrennya. Peneliti melihat sendiri iring-iringan masyarakat dari berbagai desa yang akan mengikuti pengajian kiai. Dukungan kiai terhadap orang-orang yang akan dicalonkan baik sebagai caleg, ataupun kepala daerah masih menjadi rujukan masyarakat. Pemilihan Bupati Purworejo yang salah satu calon wabupnya adalah alumni An-Nawawi berhasil memenangkan Pilkada, itu juga tak lepas dari dukungan kiai, yang kemudian diikuti oleh komunitas masyarakatnya.

Bukti lain yang menjelaskan tentang eksistensi pengaruh kiai adalah terpilihnya beliau sebagai anggota DPD Pusat yang merupakan wakil dari Jawa Tengah. untuk menjadi anggota DPD Pusat tidak mudah karena Propinsi Jawa Tengah formasinya hanya 4 orang, yang diperebutkan oleh sekian banyak calon. Afiliasi kiai pesantren dengan Golkar tidak menjadikan citra dan pengaruh kiai menurun, namun sebaliknya, justru citra dan pengaruh kiai semakin naik.

Perkembangan Ekonomi Pesantren

Eksistensi lembaga dapat dilihat juga dari seberapa besar peningkatan pembangunan di bidang ekonomi dan infrastruktur pesantren. Dalam perkembangannya, sejak tahun 1982, pesantren An-Nawawi ini mengalami perkembangan cukup pesat, ketika pesantren ini mengalami pergantian kepemimpinan dari K.H. Nawawi kepada Putranya K.H. Achmad Chalwani. Pada masa ini, kemasyhuran-nya terkenal kemana-mana, hal ini dibuktikan dengan banyaknya santri yang datang dari berbagai daerah, bahkan sampai ada yang datang dari luar negeri. Kemasyhuran suatu lembaga tentunya ditopang oleh sarana prasarana yang memadai, sejak tahun 1982, pesantren ini telah mulai menampakkan perkembangannya. Dalam bidang pendidikan misalnya, pesantren ini mempunyai dua bidang pendidikan, yang pertama, pendidikan Madrasah (Diniyah) dan pendidikan formal yaitu: MTs, MA dan STAIAN, untuk pendidikan formal pesantren ini telah memiliki gedung baru dan megah disebelah barat pesantren.

Pondok Pesantren An-Nawawi Berjan Purworejo, menyadari bahwa kemandirian dalam bidang perekonomian akan menduduki peran strategis dalam setiap aktifitas maupun keputusan yang ditetapkan. Dalam kaitan itu, maka dikembangkanlah pola hidup ber-

koperasi dikalangan santri. Kebijakan ini secara bertahap diharapkan akan menjadi Badan Usaha Milik Pesantren (BUMP), yang diharapkan akan mampu menopang kebutuhan operasional pondok pesantren.

Melihat fasilitas ataupun infrastruktur yang dimiliki pesantren An-nawawi ini, maka criteria ini sudah memadai untuk menilai bahwa pesantren ini berada dalam kategori pesantren maju, karena ditopang oleh infrastruktur yang memadai. pembangunan gedung-gedung sumber dananya ada yang dari infak masyarakat ataupun bantuan dari pemerintah.

Jaringan Politik

Afiliasi yang dibangun oleh kiai dengan Golkar tentu akan menimbulkan persentuhan bukan hanya dengan pejabat Golkar sendiri akan tetapi juga dengan pejabat lain diluar Golkar. Afiliasi ini dibangun berdampak kepada pergaulan kiai sendiri yang semakin luas, ke berbagi bidang dan Departemen, hal ini dibuktikan dengan kunjungan bebrapa menteri dan pejabat Golkar ke pesantren An-Nawawi. Diantara para menteri yang pernah mengunjungi pesantren ini adalah mantan Menteri Agama Maftuh Basuni, mantan Menteri Informasi dan komunikasi Muhammad Nuh, mantan menteri Pemuda dan olah Raga Adiyaksa Daud dan sebagainya, sedangkan dari pejabat Golkar sendiri adalah Akbar tanjung, Agung Laksono, Aksa Mahmud dan sebagainya.

Jaringan ini tidak berhenti dengan orang-orang pusat saja, akan tetapi dengan pejabat daerahpun kiai mempunyai banyak kenalan/ jaringan yang cukup signifikan. Bebrapa kali calon yang didukung beliau terbukti jadi, hal ini bias terlihat dengan berhasil mendukung terpilihnya pasangan Pilkada Purworejo tahun 2005, yang didalamnya ada calon wakil Bupati dari santri Pesantren An-Nawawi yaitu; Drs. HR. Mahsun Zain. Ada juga nama K.H. Abdul Jalil yang terpilih menjadi anggota DPR dari golkar yang juga didukung oleh kiai. Kemudian kiai sendiri pada periode lalu berhasil terpilih menjadi anggota DPD Pusat mewakili daerah Jawa Tengah, dengan total perolehan suara 881.050 suara. Untuk mengumpulkan suara sebanyak itu bukan hal yang mudah, karena memerlukan kekuatan jaringan, meskipun suara itu bukan semuanya dari Golkar, karena di luar Golkar sendiri kiai punya jaringan luas, akan tetapi untuk suara Golkar di Purworejo sendiri sangat signifikan dalam mendukung pencalonan kiai menjadi anggota DPD Pusat.

Sebelum pencalonan pimpinan-pimpinan Golkar Kecamatan di Purworejo dikumpulkan dikantor Golkar Purworejo dalam upaya mendukung pencalonan kiai jadi anggota DPD Pusat (wawancara

dengan staf pengurus Golkar DPD Tk.II Purworejo). Kemampuan kiai dalam membangun jaringan dimanfaatkan kiai untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan yang diapresiasi untuk kepentingan lembaga dan dakwah. keterkaitannya dengan partai politik dimanfaatkannya untuk ikut memberikan sumbangsih bagi perbaikan politik baik di lingkungan Golkar sendiri maupun lingkup partai secara lebih luas. Sedangkan bantuan-bantuan yang diperoleh dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan lembaga pesantren. Walaupun keuntungan secara pribadi didapatkan karena sudah menjadi haknya sebagai anggota DPD RI untuk mendapatkan gaji yang layak.

Kesimpulan

Sejak kiai berafiliasi dan memberikan dukungan kepada partai Golkar, maka sejak itu pula terbangun keterkaitan-keterkaitan yang tidak bisa dihindari oleh seorang kiai. Keberpihakan kiai terhadap suatu partai politik, menuntut kiai untuk menyampaikan pesan-pesan politiknya dalam berbagai kesempatan yang dianggap relevan, tidak semua pesantren yang berafiliasi politik mendapatkan tantangan dari komunitasnya, pesantren An-Nawawi justru mendapatkan dukungan signifikan dari masyarakat, jamaah, alumni dan warga pesantren sendiri, walaupun sebelumnya pernah mendapatkan tantangan dari sebagian kalangan. Kepiawaian kiai dalam melakukan komunikasi dan sosialisasi akan sangat menentukan terhadap keberhasilannya dalam mempengaruhi masyarakat. Meskipun afiliasi politik kiai hanya sebatas moral dan kiai sendiri tidak menjadi jurkam resmi partai Golkar, namun pesan-pesan politik menjadi suatu agenda tersendiri yang mesti disampaikan kepada khalayak, tentu saja dengan cara dan modelnya tersendiri.

Bila diamati dari pandangan tentang persoalan-persoalan keagamaan dan kenegaraan diatas, antara pemikiran KH. Achmad Chalwani dan Platform partai Golkar, ditemukan banyak kesamaan-kesamaan dalam pemikiran, pertama, ada kesepakatan untuk meletakkan dan mengedepankan agama sebagai landasan perjuangan yang harus diutamakan, kedua, punya kesamaan untuk menyatukan komponen bangsa dengan bahu membahu untuk mewujudkan kesejahteraan dan terciptanya supremasi hukum, sehingga menjadi negara bangsa yang berwibawa.

Partai politik bagi kiai hanyalah sebagai sarana, fungsi esensial justru pada bagaimana ikut berperan dalam mewujudkan kebijakan publik yang memihak terhadap kepentingan masyarakat, karena kebijakan publik merupakan wujud nyata dari interaksi antara Negara dengan

masyarakat. Bagi kiai berpolitik itu semata-mata bertujuan untuk ibadah kepada Allah. Tidak ada sama sekali untuk tujuan praktis ataupun material, walaupun ada itu adalah untuk kepentingan lembaga. Bagi kiai segenap aktifitas hidup yang tidak melanggar hukum Allah adalah ibadah. Demikian juga dengan berpolitik, kalau tidak melanggar adalah ibadah. Islam sendiri tidak memisahkan secara tegas antara kehidupan dunia dan akhirat, berpolitik bagi seorang muslim sesuai dengan syariat. Berpolitik bagi kiai mempunyai tujuan memberikan benteng moralitas, kehadiran kiai dalam berpolitik diharapkan dapat memberikan sandaran moralitas.

Bila dikaitkan dengan Visi pesantren, yaitu; "mempertahankan suatu yang baik dari masa lampau dan mau menerima sesuatu yang lebih baik dari masa sekarang", maka akan ditemukan, mengapa kiai berafiliasi dengan partai Golkar, alasannya adalah partai Golkar adalah partai lama yang sudah berpengalaman dan profesional, sehingga tidak perlu membuat kekuatan baru yang pengalamannya belum matang, lebih baik memperkuat dan mempertahankan yang sudah ada dan memiliki kematangan berpolitik dari pada membuat kekuatan baru yang tidak mumpuni.

Lembaga pesantren An-Nawawi sendiri tidak secara formal menyatakan diri berafiliasi dan mendukung Golkar, karena hal ini terkait dengan etika lembaga. Lembaga sendiri tidak terlalu penting untuk menyatakan secara formal berafiliasi dengan Golkar, tapi esensinya adalah bagaimana komunitas pesantren memberikan dukungan terhadap Golkar, terutama ketika pencoblosan di bilik suara.

Dalam dunia politik juga berlaku hukum untung rugi, bila dilihat dari teori ekonomi politik, afiliasi politik yang dibangun oleh kiai pada akhirnya juga akan bermuara kepada kepentingan. Bagi seorang kiai kepentingan politik bukan hanya untuk dirinya akan tetapi untuk kepentingan lembaga dan umatnya, walaupun pada akhirnya akan berimbas kepada keuntungan dirinya secara pribadi, karena itu merupakan konsekwensi dari kebutuhan manusia. Begitu juga dengan K.H. Achmad Chalwani, beliau membangun afiliasi politik dengan Golkar bukan hanya kepentingan pribadi, ada kepentingan syiar Islam, kepentingan lembaga, dan kepentingan untuk masyarakatnya, namun tidak bias mengelak bila itu juga ada kepentingan pribadi, sebagai upaya memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak, karena bila dilihat dari kondisi rumah dan kendaraan yang dimiliki.

Pengaruh dan kedekatan kiai dengan masyarakat yang begitu rekat, memungkinkan kiai untuk selalu memikirkan kepentingan dan

kebutuhan masyarakat dan santrinya, sehingga afiliasi politik yang dibangun kiai juga tidak akan lepas dari kepentingan Islam dan Masyarakat. Pilihan-pilihan kiai terhadap calon pemimpin dalam setiap kesempatan, yang didasarkan kepada karakteristik orang yang hendak dipilih, ini dimaksudkan agar terseleksi mana orang-orang yang mau dan mampu berjuang untuk kepentingan umat atau masyarakat luas. Hal ini berkaitan dengan salah satu tujuan berdirinya pesantren An-Nawawi yaitu; menyebarkan misi Islam melalui dakwah yang bertanggung jawab terhadap masyarakat luas.

Aktifitasnya di berbagai organisasi cukup memberi wawasan untuk memahami dinamika politik yang berkembang, ditambah dengan pergaulannya dengan para politisi baik di tingkat local maupun pusat, kekagumannya kepada politisi Golkar Akbar Tanjung menunjukkan bahwa kiai selalu aktif mengamati dan mempelajari perkembangan politik di tanah air. Latar belakang pendidikan kiai diatas, ditunjang dengan pengalaman berorganisasi yang cukup matang, pergaulannya dengan pejabat dari berbagai departemen, maka cukup kiranya untuk memberikan dorongan kiai dalam menentukan sikap politiknya, sehingga memilih untuk berafiliasi dengan partai Golkar.

Afiliasi politik yang dibangun kiai ternyata tidak merubah citra kiai, kiai masih dianggap sebagai tokoh yang menjadi panutan bagi publiknya. Afiliasi kiai dengan Golkar dianggap sebagai ijtihad politik yang tidak perlu dipertentangkan. Pada masa awal kiai berafiliasi dengan Golkar sempat terjadi resistensi dari suatu masyarakat tertentu, namun karena pendekatan dan cara penyampaian kiai cukup bisa dimengerti, maka pada akhirnya, semua dapat menerima dan memahami alasan kiai untuk berafiliasi dengan Golkar. Afiliasi politik yang dibangun juga tidak mengurangi pengaruh kiai, ceramah atau tausyiahnya masih diperhatikan oleh jamaah dan masyarakatnya. Kenyataan ini dibuktikan dengan masih membludaknya jamaah Tariqat dan jamaah pengajian mingguan di pesantrennya. Bukti lain yang menjelaskan tentang eksistensi pengaruh kiai adalah terpilihnya beliau sebagai anggota DPD Pusat yang merupakan wakil dari Jawa Tengah. untuk menjadi anggota DPD Pusat tidak mudah karena Propinsi Jawa Tengah formasinya hanya 4 orang, yang diperebutkan oleh sekian banyak calon. Afiliasi kiai pesantren dengan Golkar tidak menjadikan citra dan pengaruh kiai menurun, namun sebaliknya, justru citra dan pengaruh kiai semakin naik.

Afiliasi politik kiai terhadap Golkar, ternyata tidak mempengaruhi terhadap eksistensi ajaran kiai, ajaran kiai masih tetap menjadi

rujukan bagi komunitas pesantren dan masyarakatnya. Aktifitas kiai sampai saat masih tetap padat, selain pengajian untuk santri dan jamaah Thariqotnya, kiai juga harus menyampaikan pengajian ke berbagai tempat baik di lingkungan komunitasnya ataupun undangan ke berbagai tempat di luar daerah Purworejo.

Daftar Pustaka

- Ahimsha, Heddy Shri. 2007. *Paradigma, Epistemology dan Metode Ilmu Sosial Budaya: Sebuah Pemetaan*. Makalah disampaikan dalam pelatihan "metodologi penelitian", diselenggarakan oleh CRCS – UGM, di Yogyakarta
- Abdullah, Irwan. 2009. *Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Abidin, Didin. 2005. *Afiliasi Politik Masyarakat Tionghoa terhadap Partai Demokrat dalam pemilu 2004 di Kota Pontianak*, Tesis S2 Ilmu Politik UGM.
- Berger, Peter L dan Thomas Luckmann. 1990. *Tafsir Sosial Atas Kenyataan: Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan*. terjemahan Hasan Basri, Jakarta, LP3ES.
- Dhofier, Zamakhsyari. 1982. *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kiai*, Jakarta, LP3S.
- Garna, Judistira K. 2008. *Dasar dan Proses Penelitian Sosial: merencanakan, Melaksanakan, dan Menulis Hasil Penelitian*, Bandung, Primaco Akademika dan Judistira Garna Foundation.
- Gertz, Clifort. 1989. *Abangan, Santri, dan Priyayi dalam Masyarakat Jawa*. Jakarta, Pustaka Jaya.
- Ida, laode. 1986. *Anatomi Konflik NU, Elit Islam dan Negara*. Jakarta, pustaka Sinar Harapan.
- Ikhsn, M. Faiqul. 1996. *Khittab 1926 dan Perilaku Politik Ulama NU*, Tesis Magister UGM.
- Koentjaraningrat. 1984. *Kamus Istilah Antropologi*. Jakarta, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Krech, David at al. tt. *Individual in Society*. California, McGraw-Hill Kogakusha, LTD.
- K. Yin, Robert. 2003. *Studi Kasus, Desain dan Metode*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Kartono, Kartini. 1996. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, C.V. Bandung, Mandar Maju

- Muhtadi, Asep Saeful. 2004. *Komunikasi politik NU: Pergulatan Pemikiran Politik Radikal dan Akomodatif*, Jakarta, LP3S.
- _____. 2008. *Komunikasi Politik Indonesia: Dinamika Islam Politik Pasca Orde Baru*, Bandung, Remaja Rosda Karya.
- Maunah, Binti. 2009. *Tradisi Intelektual Santri dalam Tantangan dan Hambatan Pendidikan Pesantren di Masa Depan*. Yogyakarta, Teras
- Moleong, Lexy. J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, P.T. Bandung, Remaja Rosda Karya
- Nazsir, Nasrullah. 2008. *Teori-teori Sosiologi*. Bandung, Widya Padjadjaran
- Poloma, Margaret M. 2000. *Sosiologi Kontemporer*, terjemahan Tim Yasogama, Yogyakarta, Raja Grafindo Persada.
- Patoni, Achmad. 2007. *Peran Kiai Pesantren dalam Partai Politik*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Pedoman Kerja Pengurus Pondok Pesantren An-Nawawi Berjan Purworejo, 2009. untuk Masa Khidmah 1430-1432 H / 2009-2011 M.
- Rahman, Budhi Munawar. 1995. *Kontektualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*. Jakarta, Paramadina.
- Tanjung, Akbar. 2007. *The Golkar Way: Survival Partai Golkar di Tengah Turbulensi Politik Era Transisi*. Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Toekan, Musa Latua. 2000. *Afiliasi Kepartaian Kaum Santri dalam Pemilu 1999*, Tesis Prodi Ilmu Politik, Sekolah Pascasarjana UGM.
- Turmudi, Endang. 2004. *Perselingkuhan Kiai dan kekuasaan*, Yogyakarta, LKiS.
- Ummatin, Khoiro. 2001. *Kiai Pesantren dan Politik: Kajian Perilaku Memilih pada pemilu 1999 di Yogyakarta*. Dalam Jurnal penelitian Agama, Vol X. No. 2 Mei – Agustus 2001.
- http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Purworejo
- <http://akhmadsudrajat.wordpress.com/2008/02/09/teori-nilai/>